

Pengaruh Fraud Pentagon Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Fawazkha Salsa Binha Viary¹, Unggul Purwohed², Aji Ahmadi Sasmi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 13, 2026

Revised Juli 13, 2026

Accepted Juli 14, 2026

Kata Kunci:

Fraud Pentagon Theory, Tekanan, Tekanan, Rasionalisasi, Kapabilitas

Keywords:

Fraud Pentagon Theory, Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi dan Teori Sinyal sebagai landasan teori. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi sebanyak perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 168 observasi, yang setelah dilakukan penanganan outlier menjadi 149 observasi. Kecurangan laporan keuangan diukur menggunakan Beneish M-Score, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel berbantuan EViews 13. Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*, model regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil Uji Parsial (uji t) menunjukkan bahwa tekanan (*leverage*), peluang (efektivitas pengawasan), kapabilitas (pergantian direksi), arogansi (jumlah foto CEO), dan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance Disclosure index*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh elemen *Fraud Pentagon Theory* mampu menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik financial statement fraud pada sektor infrastruktur lebih dipengaruhi oleh faktor rasionalisasi dibandingkan tekanan, peluang, kapabilitas, arogansi, maupun tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu menjaga kualitas pelaporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan proses pergantian auditor dilakukan secara transparan agar dapat meminimalkan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.

ABSTRACT

This study is based on Agency Theory and Signaling Theory. A quantitative research approach was employed using infrastructure sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange as the research population. The sample was selected using a purposive sampling technique, resulting in 168 observations, which were reduced to 149 observations after outlier treatment. Financial statement fraud was measured using the Beneish M-Score, while panel data regression analysis was conducted using EViews 13. Based on the Chow Test, Hausman Test, and Lagrange Multiplier Test, the Random Effect Model (REM) was selected as the most appropriate regression model. The results of the partial (t) test indicate that pressure (leverage), opportunity (monitoring effectiveness), capability (board of directors change), arrogance (CEO photo frequency), and good corporate governance (corporate governance disclosure index) have no significant effect on financial statement fraud. In contrast, rationalization, proxied by auditor change, has a positive and significant effect on financial statement fraud. These findings suggest that not all elements of the Fraud Pentagon Theory are capable of explaining the occurrence of financial statement

fraud in infrastructure sector companies. The results indicate that financial statement fraud in the infrastructure sector is more strongly influenced by the rationalization factor than by pressure, opportunity, capability, arrogance, or the level of corporate governance disclosure. Therefore, companies are expected to maintain the quality of financial reporting, strengthen their internal control systems, and ensure that auditor changes are conducted transparently in order to minimize the risk of financial statement fraud.

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Fawazkha Salsa Binha Viary
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: fawazkha_1706622087@mhs.unj.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu entitas, baik di sektor publik maupun swasta [1]. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks keuangan negara dan korporasi nasional, kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan mencerminkan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta integritas tata kelola yang diterapkan [1]. Menurut *International Financial Reporting Standards Foundation*, kualitas informasi keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan pengguna laporan [2]. Pada penelitian oleh [3], disebutkan pernyataan oleh Dechow et al. (2010) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama dalam menilai transparansi dan kinerja perusahaan [3]. Namun demikian, konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik seringkali memicu distorsi informasi dalam laporan keuangan.

Di Indonesia telah ditetapkan berbagai regulasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, termasuk peraturan mengenai standar akuntansi dan kewajiban pelaporan yang komprehensif untuk entitas publik dan swasta [4]. Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia [5]. Namun demikian, dalam praktiknya, perusahaan cenderung berupaya menampilkan kinerja keuangan yang optimal dalam laporan yang dipublikasikan. Penyajian laporan keuangan seringkali tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya secara akurat, melainkan dirancang untuk menciptakan citra positif di kalangan pemangku kepentingan [6]. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada manajemen dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempertahankan kesan kinerja yang kuat, sehingga berpotensi memicu praktik-praktik manipulatif, terutama terkait laporan keuangan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan keuangan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat mengarah pada munculnya kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*) yang merupakan salah satu bentuk *fraud* dengan dampak kerugian yang signifikan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja dan sadar mengetahui hal ini dapat menimbulkan kejadian tidak diinginkan dan merugikan individu, entitas, atau pihak lain [7]. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* bukan hanya masalah teknis akuntansi, tetapi juga

berkaitan dengan perilaku dan motivasi individu dalam organisasi. Secara umum, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *occupational fraud* ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*).

Laporan *Occupational Fraud: A Report to the Nations* edisi ke-14 yang diterbitkan pada tahun 2026 ini menganalisis 2.402 kasus *occupational fraud* dengan total kerugian yang tercatat melebihi USD 3,4 miliar [8]. Kecurangan laporan keuangan merupakan jenis *fraud* yang paling jarang ditemukan dengan proporsi hanya sebesar 6% dari total kasus yang diteliti. Meskipun demikian, kategori ini menimbulkan dampak kerugian yang paling besar dibandingkan jenis *fraud* lainnya, dengan median kerugian mencapai USD 1.000.000 per kasus [8]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun frekuensi terjadinya relatif rendah, *financial statement fraud* memiliki konsekuensi finansial yang sangat signifikan bagi organisasi sehingga memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang lebih intensif.

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2025 oleh ACFE Indonesia, diketahui bahwa kecurangan laporan keuangan menyumbang sekitar 12,2% dari total kasus *fraud* di Indonesia. Selain itu, nilai kerugian yang ditimbulkan tergolong besar, yaitu berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp50 miliar per kasus [9]. Fenomena kecurangan tidak hanya terjadi pada satu sektor tertentu, melainkan tersebar di berbagai sektor industri dengan karakteristik risiko yang berbeda-beda. Kasus *fraud* banyak ditemukan pada beberapa sektor.

Perusahaan konstruksi yang merupakan bagian inti dari industri infrastruktur menempati posisi kedua tertinggi dalam kejadian *occupational fraud* di Indonesia dengan proporsi sebesar 14% [9]. Tingginya kasus *fraud* di sektor ini umumnya disebabkan oleh nilai proyek yang sangat besar, proses pengadaan yang kompleks, serta keterlibatan banyak pihak sehingga membuka peluang terjadinya *mark-up* anggaran dan kolusi [10]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki faktor risiko yang berbeda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh kombinasi tekanan, peluang, serta kelemahan sistem pengendalian.

Sektor infrastruktur termasuk dalam industri yang terdampak *fraud* dengan tingkat yang cukup signifikan [9]. Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang tidak hanya berperan dalam memperkuat konektivitas wilayah dan efisiensi logistik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi dan infrastruktur terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 menempati urutan kelima dengan kontribusi sebesar 9,9% (Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2024). Perkembangan sektor infrastruktur di Indonesia juga menunjukkan tren yang semakin meningkat, terutama sejak pemerintah menggiatkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dalam dua periode terakhir mencatat 233 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp6.246 triliun (Nicholas Martua Siagian, 2025). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan sebagai komponen utama ekosistem infrastruktur, mengalami pertumbuhan tertinggi di antara seluruh sektor pada tahun 2022 dan 2023, yaitu di kisaran 15%, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Sektor infrastruktur memiliki karakteristik yang unik dalam mendukung pengembangan dan produktivitas ekonomi suatu negara. Pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antar daerah [12].

Sejalan dengan penelitian oleh Parulian dan Mahendra [11] yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) serta daya saing nasional [11]. Dengan demikian, sektor ini menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Namun demikian, di balik peran strategis tersebut, sektor infrastruktur juga memiliki risiko tinggi terhadap praktik kecurangan (*fraud*), khususnya dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik proyek yang bernilai besar, melibatkan banyak pihak, serta proses pengadaan yang kompleks membuka peluang terjadinya manipulasi dan penyimpangan. Praktik *fraud* dalam sektor ini seringkali terjadi dalam bentuk

mark-up anggaran, penggelembungan biaya proyek, hingga manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi sebenarnya [13].

Fenomena kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur telah terjadi di Indonesia, khususnya pada perusahaan konstruksi yang menghadapi tekanan keuangan akibat proyek berskala besar dan kompleks. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang mengalami permasalahan keuangan serius akibat tingginya beban utang serta ketidaksesuaian dalam pengelolaan proyek [14]. Berdasarkan hasil investigasi, BPKP menduga rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya telah berlangsung sejak tahun 2016 melalui taktik menyembunyikan tagihan dari vendor, sehingga beban utang terlihat menciut dan kondisi keuangan tampak sehat (BPKP, 2023). Skandal ini juga melibatkan rekayasa pengakuan pendapatan, penggunaan kontrak fiktif, serta pencatatan transaksi yang tidak sesuai kondisi riil, yang mengakibatkan kerugian PT Waskita Karya diperkirakan mencapai Rp830,63 miliar (CNBC Indonesia, 2023). Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya dalam menjaga citra kinerja keuangan di mata investor dan kreditur.

Tingginya kasus *financial statement fraud*, menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi perusahaan. Praktik ini tidak hanya merugikan investor dan kreditur yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas perusahaan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan agar tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam upaya memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan laporan keuangan, berbagai teori *fraud* telah dikembangkan oleh para peneliti. Teori-teori tersebut berupaya menjelaskan kondisi yang mendorong individu maupun manajemen melakukan tindakan kecurangan

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya *fraud*, mulai dari teori yang paling sederhana hingga teori yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan praktik bisnis dan kompleksitas organisasi modern. Teori pertama yang menjadi fondasi adalah *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan muncul akibat kombinasi tiga kondisi, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). *Fraud Triangle* menjadi teori paling luas diterima dalam kajian awal mengenai *fraud* karena mampu menjelaskan motivasi dasar pelaku secara konseptual dan sederhana. Namun, *Fraud Triangle* dianggap belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas kecurangan di lingkungan organisasi yang lebih modern, sehingga Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan *Fraud Diamond Theory* dengan menambahkan elemen keempat, yaitu kapabilitas (*capability*). Penambahan elemen ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua individu yang memiliki tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi akan mampu mengeksekusi kecurangan tanpa memiliki kemampuan dan posisi yang memadai dalam perusahaan.

Perkembangan lebih lanjut melahirkan *Fraud Pentagon Theory* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath (2011) dengan menambahkan elemen kelima, yaitu arogansi (*arrogance*), yang mencerminkan sikap superioritas atau rasa tidak dapat tersentuh yang dimiliki pelaku berkuasa. Pada perkembangan yang lebih baru, Georgios L. Voutsinas (2019) memperkenalkan *Fraud Hexagon Theory* (SCORE) dengan menambahkan elemen keenam, yaitu kolusi (*collusion*), yang mengakui bahwa kecurangan yang kompleks seringkali melibatkan kerja sama antar beberapa pihak. Meskipun demikian, *Fraud Hexagon* masih relatif baru dan keterbatasan proksi yang terukur untuk elemen kolusi menjadikannya lebih sulit diuji secara empiris pada data laporan keuangan perusahaan publik.

Berdasarkan uraian perkembangan teori di atas, penelitian ini memilih untuk menggunakan *Fraud Pentagon Theory* dibandingkan dengan *Fraud Hexagon Theory* karena elemen kolusi masih sulit diproksikan secara konsisten dalam data publik yang tersedia. Penggunaan *Fraud Pentagon Theory*

dianggap sudah cukup untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu yang menguji kelima elemen tersebut, yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance*, terhadap *financial statements fraud* masih menunjukkan temuan yang beragam. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam *Fraud Pentagon Theory* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Dalam *fraud pentagon theory*, tekanan menjadi faktor penting karena semakin tinggi tuntutan yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan tindakan *fraud*. Tekanan dapat berasal dari target keuangan, kondisi keuangan perusahaan, maupun tekanan eksternal. *Pressure* atau tekanan merupakan kondisi ketika manajemen menghadapi tuntutan tertentu, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, seperti target laba, stabilitas keuangan, serta ekspektasi investor dan kreditur. Tekanan ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar perusahaan tetap terlihat memiliki kinerja yang baik. Penelitian terdahulu yang membahas terkait tekanan ini menunjukkan hasil yang beragam.

Sebuah penelitian oleh [15] menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [15]. Hasil serupa juga ditemukan oleh Damarjati & Yulianti [16] dan Basyar et al [4] yang menunjukkan bahwa *pressure* yang diproksikan dengan tekanan luar memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan [15]. Namun, penelitian oleh Dewi & Yuliaty [17] dan Wicaksono et al [18] menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [17]. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *pressure* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya, peluang atau *opportunity* juga menjadi faktor yang memungkinkan tindakan manipulasi dilakukan tanpa mudah terdeteksi. Semakin lemah sistem pengendalian internal, maka semakin besar peluang terjadinya *fraud*. *Opportunity* atau kesempatan merupakan kondisi yang memberikan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, serta adanya celah dalam sistem perusahaan.

Penelitian oleh [7], menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, artinya peluang yang diproksikan dengan *ineffective monitoring* belum tentu meningkatkan terjadinya kecurangan laporan keuangan [7]. Di sisi lain, penelitian oleh Islamiati & Putra [19] menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana semakin tingginya pengawasan akan menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan [19]. Akan tetapi, terdapat penelitian oleh Burlacu et al [20] yang menunjukkan bahwa *opportunity* yang menggunakan proksi *ineffective monitoring* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [20]. Adanya perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *opportunity* masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *opportunity* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Selanjutnya, rasionalisasi menjadi faktor psikologis yang memungkinkan individu tetap merasa benar meskipun melakukan tindakan *fraud*. Rasionalisasi sering muncul sebagai bentuk pembenaran atas tekanan yang dihadapi perusahaan. *Rationalization* atau rasionalisasi merupakan sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Pelaku cenderung menganggap bahwa tindakan manipulasi yang dilakukan merupakan hal yang wajar atau dapat diterima. Rasionalisasi diproksikan dengan pergantian auditor, dimana hal ini dapat mengurangi kemungkinan terdeteksinya praktik manipulasi laporan keuangan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dengan adanya auditor baru, pemahaman terhadap kondisi perusahaan dan riwayat pelaporan keuangan memerlukan waktu penyesuaian, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan laporan keuangan menjadi lebih besar.

Penelitian oleh Wicaksono et al. [18] menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [18]. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Isu dan

Sofie [21] yang menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [21]. Namun, penelitian oleh Damarjati dan Yulianti [16] menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [16]. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *rationalization* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Lalu, kemampuan atau kapabilitas juga menjadi faktor yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam melakukan dan menyembunyikan tindakan kecurangan. Kapabilitas memungkinkan pelaku untuk memahami sistem perusahaan secara mendalam serta memanfaatkan celah yang ada tanpa mudah terdeteksi. *Capability* atau kapabilitas merupakan kemampuan, keahlian, serta posisi strategis yang dimiliki oleh individu sehingga memungkinkan dirinya melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Pelaku dengan kompetensi tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sistem dan informasi perusahaan, sehingga peluang untuk melakukan manipulasi menjadi lebih besar.

Penelitian oleh Isu dan Sofie [21] menunjukkan bahwa kapabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [21]. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Huang et al. (2025) yang menemukan bahwa perubahan direksi sebagai proksi kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan [22]. Disisi lain, penelitian oleh Fernanda dan Susilo (2025) menunjukkan bahwa *capability* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana jika terdapat pergantian direksi maka kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin rendah karena kompetensi dari direksi tersebut [23]. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah kapabilitas berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Faktor terakhir dalam Fraud Pentagon Theory adalah arogansi (*arrogance*), yaitu sikap superioritas atau keyakinan berlebihan yang dimiliki individu sehingga merasa dirinya memiliki kekuasaan dan kendali yang lebih besar dibandingkan pihak lain dalam organisasi. Sikap tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengabaikan aturan, prosedur, maupun mekanisme pengendalian internal yang berlaku karena meyakini bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi atau tidak akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan dirinya. Dalam konteks perusahaan, arogansi umumnya dikaitkan dengan manajemen puncak yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan laporan keuangan. Arogansi dapat diproksikan dengan frekuensi kemunculan foto CEO (*CEO's Picture*) dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak foto CEO yang ditampilkan, semakin besar kemungkinan adanya keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi, atau citra diri kepada para pemangku kepentingan.

Penelitian Dewi dan Yulianti [17] menemukan bahwa frekuensi foto CEO sebagai proksi arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan [17]. Namun, penelitian oleh Damarjati dan Yulianti [16] menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, yang artinya semakin tinggi superioritas dari manajemen puncak, maka kecurangan laporan keuangan dapat dikendalikan [16]. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah *arrogance* berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Dalam praktiknya, kecurangan laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan internal manajemen saja, tetapi juga oleh kuat atau lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan perusahaan. Dengan begitu, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dapat menjadi variabel penting dalam penelitian ini sebagai mekanisme pengendalian yang dapat menekan peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta pengendalian yang efektif atas pengelolaan perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat meminimalkan asimetri

informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Salah satu indikator utama dalam pengukuran kualitas tata kelola perusahaan adalah pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang relevan, lengkap, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan [24]. Semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan, maka semakin kecil ruang bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi yang bersifat material atau melakukan rekayasa terhadap kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perusahaan publik di Indonesia, kewajiban pengungkapan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan standar minimum informasi yang harus disampaikan dalam laporan tahunan maupun laporan keuangan berkala.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan sebagai proksi tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan temuan yang terbatas. Terdapat Penelitian oleh [25] menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik mekanisme tata kelola perusahaan, maka semakin rendah potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan [25]. Selanjutnya, penelitian Savitri dan Herliansyah [26] menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penyalahgunaan aset. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut terbatas pada *asset misappropriation* di sektor perbankan, bukan pada kecurangan laporan keuangan [26]. Selain itu, penelitian As'ad dan Sulistyowati [27] membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada *fraud prevention* di perusahaan pertambangan, bukan pada indikasi manipulasi laporan keuangan [27]. Dengan adanya keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah tata kelola perusahaan berpotensi mempengaruhi kecurangan laporan keuangan..

2. METODE

2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian kuantitatif, populasi menjadi sumber data utama yang mencakup seluruh elemen yang relevan dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2023–2025.

2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Penggunaan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti seluruh populasi. Oleh karena itu, sampel harus dipilih secara tepat agar dapat mewakili populasi dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar sampel yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis secara statistik untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) serta situs resmi masing-masing perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan *Fraud Pentagon*, tata kelola perusahaan, dan kecurangan laporan keuangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

2.4 Uji Stastistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian secara ringkas dan terstruktur. Menurut Purwohedi (2022), statistik deskriptif memberikan indikasi awal adanya permasalahan pada data penelitian, khususnya dengan melihat ukuran pemusatan data (*Mean* dan *Median*) dan penyebaran data (Standar Deviasi). *Mean* digunakan untuk menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data sehingga dapat menggambarkan kecenderungan umum dari suatu variabel. Median digunakan untuk menunjukkan nilai tengah dari data yang telah diurutkan, sehingga dapat memberikan gambaran distribusi data yang lebih stabil terutama ketika terdapat data ekstrem (*outlier*). Standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata, di mana semakin besar nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data semakin bervariasi, sedangkan nilai yang kecil menunjukkan data lebih homogen. Selain itu, nilai maksimum dan minimum digunakan untuk mengetahui rentang data (*range*) sehingga dapat mengidentifikasi adanya nilai ekstrem dalam data penelitian.

2.5 Uji Model Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan model estimasi utama dalam regresi data panel yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik di antara ketiga model tersebut dilakukan melalui serangkaian pengujian statistik yang sistematis dengan upaya menentukan validitas dan akurasi hasil pengujian hipotesis sehingga perlu dilakukan serangkaian pengujian secara bertahap.

2.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, perlu dipenuhi beberapa asumsi klasik dalam model regresi agar estimator yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Menurut Purwohedi (2022), model regresi yang baik harus terbebas dari permasalahan statistik yang dapat menyebabkan bias dalam hasil analisis.

2.7 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis yang menggabungkan data *cross-section* dan *time-series* dalam satu model estimasi [28]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan perbedaan antar unit analisis secara bersamaan. Menurut Purwohedi, penggunaan data panel memberikan keunggulan dalam menangkap dinamika perubahan data dari waktu ke waktu sekaligus mengontrol perbedaan karakteristik antar unit observasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Baltagi, analisis data panel dapat

mengatasi heterogenitas yang tidak teramati, memberikan lebih banyak informasi, serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien [29].

Dalam penelitian ini, regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh *Fraud Pentagon* (tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi) terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Menurut Ghozali [28], Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *balanced panel*, di mana setiap unit observasi memiliki jumlah pengamatan yang sama pada setiap periode waktu. Secara umum, model regresi data panel dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

2.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah bukti empiris yang diperoleh dari data sampel cukup kuat untuk mendukung atau menolak pernyataan (hipotesis) yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Purwohedi, hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang harus dibuktikan melalui analisis statistik. Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan Uji Signifikansi Parsial (Uji t).

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan dalam model penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, yang meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian, yaitu kecurangan laporan keuangan (*Beneish M-Score*) sebagai variabel dependen, serta *leverage* (LEV), *ineffective monitoring* (BDOUT), *total accrual to total asset* (TATA), pergantian direksi (DCHANGE), frekuensi foto CEO (CEOPIC), dan pengungkapan tata kelola perusahaan (CGDI) sebagai variabel independen.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data setelah dikeluarkannya observasi outlier, sehingga jumlah data (N) yang dianalisis adalah sebanyak 149 observasi.

3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji pemilihan model dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga uji yang umum digunakan dalam menentukan model regresi data panel terbaik, yaitu Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa CEM merupakan model yang lebih sesuai, maka pengujian dapat dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* untuk memastikan pilihan antara CEM dan *Random Effect Model* (REM). Sebaliknya, apabila hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai dibandingkan CEM, maka pengujian dilanjutkan dengan Uji *Hausman* untuk menentukan model terbaik antara FEM dan REM.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi data panel yang digunakan telah memenuhi syarat-syarat statistik, sehingga menghasilkan estimasi parameter yang *Best Linear*

Unbiased Estimator (BLUE). Pengujian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menilai apakah suatu model mengalami multikolinearitas, yaitu kondisi di mana terdapat hubungan linier yang sangat kuat antara beberapa maupun seluruh variabel independennya. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi antar variabel independen. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen melebihi 0,80, maka terdapat indikasi adanya masalah multikolinearitas yang serius dalam model.

3.3.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menilai apakah nilai residual pada model regresi memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk menentukan apakah data residual terdistribusi normal, dapat dilihat melalui nilai statistik *Jarque-Bera* atau nilai probabilitas yang menyertainya. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* $\geq 0,05$, maka residual berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera* $< 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas merupakan kondisi di mana varians residual tetap konstan untuk setiap nilai variabel independen. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji *Glejser*, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Kriteria keputusan adalah apabila nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen dalam regresi *auxiliary* $\geq (\alpha = 0,05)$, maka H_0 tidak dapat ditolak sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.3.4 Uji Autikorelasi

Autokorelasi terjadi ketika terdapat hubungan antara nilai residual dari satu observasi dengan observasi lainnya. Dampak dari autokorelasi adalah varians menjadi bias, sehingga menghasilkan nilai *R-Squared* dan *F-Statistik* yang cenderung terlalu tinggi. Dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi dilakukan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW). Nilai statistik *Durbin-Watson* berada di antara 0 hingga 4. Tidak terdapat autokorelasi positif apabila nilai DW berada di atas nilai d_U , tidak terdapat autokorelasi negatif apabila nilai DW berada di bawah $4-d_U$, dan terdapat autokorelasi apabila nilai DW berada di bawah d_L atau di atas $4-d_L$.

3.3.5 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis yang menggabungkan data *cross-section* dan *time-series* dalam satu model estimasi. Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel, model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, model tersebut digunakan untuk mengestimasi pengaruh Tekanan (X1), Peluang (X2), Rasionalisasi (X3), Kapabilitas (X4), Arogansi (X5), dan Tata Kelola Perusahaan (X6) terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

3.3.6 Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian hipotesis merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah bukti empiris yang diperoleh dari data sampel cukup kuat untuk mendukung atau menolak pernyataan

(hipotesis) yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan Uji Signifikansi Parsial (Uji t). Uji Signifikansi Parsial (Uji t) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas t-statistik $< 0,05$, maka variabel independen yang bersangkutan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.4 Pembahasan

Berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, berikut pembahasan hasil penelitian terkait pengaruh *fraud pentagon* dan tata kelola perusahaan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.

3.4.1 Pengaruh Tekanan (*Pressure*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tekanan yang diproksikan dengan leverage berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel leverage memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,011748 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7463, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Meskipun arah koefisien menunjukkan hubungan positif sesuai dengan hipotesis yang diajukan, hasil tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak, yang berarti tekanan yang diproksikan dengan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi utang yang dimiliki perusahaan belum tentu mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan karakteristik perusahaan dalam sampel penelitian, penggunaan utang merupakan kondisi yang umum digunakan pada perusahaan sektor infrastruktur. Sektor ini merupakan sektor yang padat modal (*capital intensive*) sehingga membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan maupun pengembangan aset jangka panjang. Kondisi tersebut tercermin pada data penelitian, di mana terdapat perusahaan dengan tingkat *leverage* yang sangat tinggi, seperti PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) yang memiliki nilai leverage sebesar 3,578 pada tahun 2024. Meskipun perusahaan tersebut memiliki tingkat ketergantungan terhadap utang yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam sampel, nilai Beneish M-Score setelah transformasi dan penanganan outlier masih berada pada kisaran 1,724, yang tidak berbeda secara ekstrem dibandingkan perusahaan lain.

Sebaliknya, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) memiliki *leverage* yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,010, tetapi nilai Beneish M-Score perusahaan tersebut juga relatif tinggi, yakni 1,553 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi tidak selalu memiliki indikasi kecurangan laporan keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan leverage rendah. Dengan kata lain, tekanan yang timbul akibat tingginya tingkat utang belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur.

Berdasarkan Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, tingginya tingkat leverage dapat meningkatkan tekanan yang dihadapi manajemen karena perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar kepada kreditur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham maupun kreditur sebagai prinsipal. Dalam upaya memenuhi ekspektasi para prinsipal, manajemen dapat terdorong melakukan kecurangan laporan keuangan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan yang diproksikan dengan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun leverage secara teori dapat

meningkatkan tekanan bagi manajemen, tekanan tersebut belum tentu diwujudkan dalam bentuk manipulasi laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur. Namun, berdasarkan Teori Sinyal yang dikemukakan oleh Spence, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tetap memiliki dorongan untuk menyajikan informasi keuangan secara andal agar mampu mempertahankan kepercayaan investor dan kreditur. Kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa *leverage* dalam penelitian ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Yulianti et al. yang menunjukkan bahwa tekanan yang diprosikan menggunakan *leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana dalam penelitiannya disebutkan tingginya tingkat *leverage* belum tentu mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan karena perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi umumnya berada di bawah pengawasan kreditur yang lebih ketat, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan menjadi lebih terbatas. Temuan serupa juga diperoleh Bader et al. yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan menjelaskan bahwa penggunaan utang lebih mencerminkan strategi pendanaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional maupun investasi dibandingkan sebagai bentuk tekanan yang mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini turut didukung oleh Huang et al. yang menemukan bahwa tingkat leverage yang tinggi cenderung meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal untuk menjaga kepercayaan investor maupun kreditur, sehingga tekanan akibat tingginya utang tidak secara langsung meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan [22].

3.4.2 Pengaruh Peluang (*Opportunity*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa peluang yang diprosikan dengan efektivitas pengawasan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel efektivitas pengawasan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,144 dengan nilai probabilitas sebesar 0,252, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin efektif mekanisme pengawasan perusahaan, kecenderungan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin rendah. Akan tetapi, pengaruh tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) ditolak, yang berarti efektivitas pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen sebagai indikator efektivitas pengawasan belum mampu menjelaskan adanya perbedaan tingkat kecurangan laporan keuangan antarperusahaan. Berdasarkan data penelitian, mayoritas perusahaan memiliki proporsi komisaris independen yang relatif seragam, yaitu berkisar antara 33,3% hingga 66,7%, bahkan terdapat perusahaan seperti PT First Media Tbk yang memiliki proporsi komisaris independen mencapai 100% pada tahun 2024 dan 2025. Meskipun demikian, perusahaan tersebut masih memiliki nilai Beneish M-Score masing-masing sebesar 1,107 dan 1,434. Sebaliknya, perusahaan seperti PT Arkora Hydro Tbk yang hanya memiliki proporsi komisaris independen sebesar 33,3% justru memiliki nilai Beneish M-Score yang tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 1,780 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya proporsi komisaris independen tidak selalu diikuti dengan rendahnya indikasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah komisaris independen, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, kompetensi, independensi dalam pengambilan keputusan, serta efektivitas pelaksanaan fungsi monitoring terhadap aktivitas manajemen.

Berdasarkan Teori Agensi, keberadaan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Begitupun dengan Teori Sinyal, perusahaan yang memiliki

mekanisme pengawasan yang baik akan memberikan sinyal positif kepada investor mengenai kualitas tata kelola perusahaan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara formal belum tentu mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan. Proporsi komisaris independen yang lebih besar belum tentu mampu mencegah praktik manipulasi laporan keuangan apabila fungsi pengawasan belum dijalankan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Basmar dan Sulfati (2022) yang menemukan bahwa *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen lebih banyak berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan dibandingkan sebagai mekanisme pengawasan yang benar-benar efektif dalam mendeteksi tindakan manipulasi laporan keuangan. Temuan serupa juga diperoleh Nurdiana dan Khusnahyang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan karena kualitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah komisaris independen, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, serta tingkat independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, hasil penelitian ini turut didukung oleh Damarjati dan Yulianti yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen belum tentu mampu membatasi peluang manajemen melakukan manipulasi apabila pengawasan yang dilakukan masih bersifat formalitas

3.4.4 Pengaruh Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pergantian auditor memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,085930 dengan nilai probabilitas sebesar **0,0371**, dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor cenderung memiliki tingkat kecurangan laporan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang berarti rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian auditor dapat menjadi salah satu kondisi yang meningkatkan peluang terjadinya rasionalisasi atas tindakan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan data penelitian, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pergantian auditor, seperti PT Remala Abadi Tbk (DATA), PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMFI), dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) yang memiliki nilai variabel pergantian auditor sebesar 1 pada tahun tertentu. Sebagian besar perusahaan tersebut juga menunjukkan nilai Beneish M-Score yang relatif tinggi dibandingkan observasi lainnya. Sebagai contoh, PT Remala Abadi Tbk pada tahun 2025 melakukan pergantian auditor dengan nilai Beneish M-Score sebesar 1,564, sedangkan PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMFI) pada tahun 2025 memiliki nilai Beneish M-Score sebesar 1,558. Selain itu, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) melakukan pergantian auditor pada tahun 2024 dan 2025 dengan nilai Beneish M-Score masing-masing sebesar 1,553 dan 1,631. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor cenderung memiliki indikasi kecurangan laporan keuangan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor.

Berdasarkan Teori Agensi, adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat mendorong manajemen untuk menyajikan informasi keuangan yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Salah satu bentuk rasionalisasi yang dapat dilakukan manajemen adalah melakukan pergantian auditor ketika auditor sebelumnya dinilai terlalu ketat dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Pergantian auditor dapat memberikan ruang bagi manajemen

untuk membenarkan tindakannya atau mengurangi kemungkinan terdeteksinya manipulasi laporan keuangan, terutama apabila auditor baru belum sepenuhnya memahami kondisi perusahaan. Selanjutnya, pergantian auditor dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan berupaya meningkatkan kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Namun, dalam kondisi tertentu, pergantian auditor justru dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif apabila dilakukan terlalu sering atau tidak memiliki alasan yang jelas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola, tetapi juga dapat menjadi salah satu indikator meningkatnya kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Isu dan Sofie yang menemukan bahwa rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pergantian auditor dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanfaatkan masa transisi auditor sehingga potensi terjadinya manipulasi laporan keuangan menjadi lebih besar. Temuan serupa juga diperoleh **Cindy Kartika, Dewi, dan Anik Yuliati (2022)** yang menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat mengurangi efektivitas proses audit pada awal masa penugasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh **Sinaga dan Arief (2023)** yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan karena auditor baru memerlukan waktu untuk memahami karakteristik perusahaan sehingga risiko tidak terdeteksinya salah saji material maupun manipulasi laporan keuangan menjadi lebih tinggi.

3.4.5 Pengaruh Kapabilitas (*Capability*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pergantian direksi memiliki nilai koefisien regresi sebesar **-0,041** dengan nilai probabilitas sebesar **0,209**, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian direksi cenderung memiliki tingkat kecurangan laporan keuangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian direksi. Akan tetapi, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) ditolak, yang berarti kapabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian direksi belum tentu mencerminkan adanya individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan ataupun menyembunyikan praktik kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan data penelitian, beberapa perusahaan seperti **PT Link Net Tbk** dan **PT PP (Persero) Tbk** melakukan pergantian direksi pada tahun tertentu yang ditunjukkan dengan nilai variabel sebesar 1. Meskipun demikian, nilai Beneish M-Score perusahaan-perusahaan tersebut tidak menunjukkan pola yang konsisten lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan pergantian direksi. **PT PP (Persero) Tbk** melakukan pergantian direksi pada tahun 2023 dan 2024, namun nilai Beneish M-Score justru mengalami penurunan dari **1,543** pada tahun 2023 menjadi **1,487** pada tahun 2024, kemudian kembali turun menjadi **1,179** pada tahun 2025 ketika tidak terjadi pergantian direksi. Di sisi lain, terdapat perusahaan seperti **PT Link Net Tbk** yang tidak melakukan pergantian direksi pada tahun 2024 tetapi memiliki nilai Beneish M-Score sebesar **1,821**, yang termasuk salah satu nilai tertinggi dalam sampel penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergantian direksi bukan merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur.

Berdasarkan **Teori Agensi**, direksi sebagai agen memiliki kewenangan dalam mengelola perusahaan sehingga secara teoritis individu yang memiliki kemampuan, dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan

laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian direksi pada perusahaan sektor infrastruktur lebih banyak dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi, penyesuaian strategi bisnis, maupun peningkatan kinerja perusahaan daripada sebagai upaya untuk memfasilitasi tindakan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, berdasarkan **Teori Sinyal**, pergantian direksi dapat dipandang sebagai sinyal positif bahwa perusahaan berupaya meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, pergantian direksi tidak selalu mencerminkan adanya kapabilitas yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basyar et al yang menunjukkan bahwa kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pergantian direksi lebih sering dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, sehingga tidak selalu berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau memfasilitasi kecurangan laporan keuangan. Temuan serupa juga diperoleh Bader et al. yang menyatakan bahwa perubahan kepemimpinan perusahaan umumnya merupakan keputusan yang telah melalui mekanisme tata kelola perusahaan serta persetujuan pemegang saham. Selain itu, Wicaksono et al. juga menemukan bahwa keberhasilan dalam melakukan *fraud* tidak hanya ditentukan oleh perubahan direksi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti efektivitas sistem pengendalian internal, budaya organisasi, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan.

3.4.6 Pengaruh Arogansi (*Arrogance*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa arogansi yang diproksikan dengan jumlah foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel jumlah foto CEO memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,001655 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8489, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah foto CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, arah koefisien yang diperoleh justru bernilai negatif sehingga tidak sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) ditolak, yang berarti arogansi yang diproksikan menggunakan jumlah foto CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyaknya foto CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan belum tentu mencerminkan tingkat arogansi pimpinan perusahaan maupun kecenderungan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Berdasarkan data penelitian, perusahaan dengan jumlah foto CEO yang relatif tinggi belum tentu memiliki nilai Beneish M-Score yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Sebagai contoh, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) pada tahun 2025 menampilkan 12 foto CEO, yang merupakan jumlah tertinggi dalam sampel penelitian, tetapi nilai Beneish M-Score perusahaan tersebut hanya sebesar 1,452, yang masih berada pada kisaran yang relatif sama dengan mayoritas perusahaan lainnya. Sebaliknya, PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) pada tahun 2023 hanya menampilkan 8 foto CEO, tetapi memiliki nilai Beneish M-Score sebesar 1,900, sedangkan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) pada tahun 2024 hanya menampilkan 3 foto CEO dengan nilai Beneish M-Score sebesar 1,234. Variasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah foto CEO tidak memiliki pola yang konsisten terhadap tingkat indikasi kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan Teori Agens, karakteristik pribadi seorang manajer, termasuk sifat percaya diri yang berlebihan (*overconfidence*), dapat meningkatkan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal apabila mendorong pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak manajemen. Kondisi tersebut direpresentasikan melalui unsur arogansi, yaitu keyakinan bahwa seorang pemimpin merasa memiliki kekuasaan yang besar sehingga menganggap dirinya mampu mengabaikan mekanisme pengendalian perusahaan. Namun, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa jumlah foto CEO tidak mampu merepresentasikan kondisi tersebut secara memadai. Dari perspektif Teori Sinyal, penyajian foto CEO dalam laporan tahunan justru dapat dipandang sebagai media komunikasi perusahaan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat citra perusahaan, serta membangun kepercayaan investor terhadap kepemimpinan perusahaan. Oleh karena itu, banyaknya foto CEO dalam laporan tahunan lebih mencerminkan strategi komunikasi perusahaan daripada indikator perilaku arogansi yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damarjati dan Yulianti yang menunjukkan bahwa arogansi yang diproksikan melalui jumlah foto CEO berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa banyaknya foto CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan tidak mencerminkan sifat arogan maupun dominasi seorang pemimpin, melainkan sering kali hanya merupakan bagian dari strategi komunikasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Temuan serupa juga diperoleh Islamiati dan Putra bahwa karakteristik personal CEO tercermin melalui banyaknya dokumentasi dalam laporan tahunan belum dapat dijadikan indikator yang mampu menjelaskan terjadinya *financial statement fraud*. Hasil penelitian ini turut didukung oleh Bader et al. yang menyimpulkan keputusan untuk melakukan fraud lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi dibandingkan karakteristik individual CEO semata.

3.4.7 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pengungkapan tata kelola perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,341606 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2831, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, arah koefisien yang diperoleh bernilai negatif sehingga tidak sesuai dengan arah hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) ditolak, yang berarti tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan pengungkapan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan yang tinggi belum tentu memiliki tingkat indikasi kecurangan laporan keuangan yang lebih rendah maupun lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Berdasarkan data penelitian, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), dan PT PP Presisi Tbk (PPRE) memiliki nilai indeks pengungkapan tata kelola perusahaan sebesar 1,000, yang menunjukkan tingkat pengungkapan paling tinggi dalam sampel penelitian. Meskipun demikian, nilai Beneish M-Score ketiga perusahaan tersebut masih bervariasi. Di sisi lain, PT Hadean Consulting Tbk (HADE) dan PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) memiliki tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan yang relatif lebih rendah, yaitu sebesar 0,788, tetapi nilai Beneish M-Score keduanya juga tidak menunjukkan perbedaan yang ekstrem dibandingkan perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa luasnya pengungkapan tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan belum tentu mencerminkan efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan Teori Agensi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik seharusnya mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai prinsipal melalui peningkatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu menurut Teori Sinyal, pengungkapan tata kelola perusahaan merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada investor mengenai komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya tingkat pengungkapan belum mampu menjelaskan tingkat kecurangan laporan keuangan secara signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan lebih mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulator terkait pelaporan tata kelola daripada menggambarkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan dalam praktik operasional sehari-hari.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Asriani et al. yang menemukan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tingginya tingkat pengungkapan *Good Corporate Governance* belum tentu mencerminkan implementasi tata kelola yang efektif. Pengungkapan tersebut cenderung dilakukan untuk memenuhi regulasi dan kewajiban transparansi sebagai perusahaan publik, sehingga belum mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi perusahaan.

4. KESIMPULAN

Tekanan (pressure) yang diproksikan dengan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif sesuai hipotesis, hasil pengujian menunjukkan bahwa tingginya tingkat leverage belum tentu mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang pada perusahaan sektor infrastruktur lebih mencerminkan strategi pendanaan perusahaan dibandingkan sebagai tekanan yang mendorong terjadinya financial statement fraud.

Peluang (opportunity) yang diproksikan dengan efektivitas pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen yang relatif tinggi belum sepenuhnya menjamin efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dengan demikian, proporsi komisaris independen belum mampu menjadi faktor yang secara signifikan memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Rasionalisasi (rationalization) yang diproksikan dengan pergantian auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami indikasi kecurangan laporan keuangan. Pergantian auditor diduga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk mengurangi efektivitas proses audit pada masa transisi sehingga meningkatkan risiko terjadinya financial statement fraud.

Kapabilitas (capability) yang diproksikan dengan pergantian direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Pergantian direksi tidak selalu berkaitan dengan upaya melakukan manipulasi laporan keuangan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, penyegaran organisasi, maupun penyesuaian strategi bisnis.

Arogansi (arrogance) yang diproksikan dengan jumlah foto CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Banyaknya foto CEO yang ditampilkan dalam laporan tahunan tidak dapat dijadikan indikator bahwa seorang CEO memiliki tingkat arogansi yang tinggi ataupun kecenderungan melakukan manipulasi laporan keuangan. Pengungkapan foto CEO lebih banyak digunakan sebagai media komunikasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang diproksikan dengan tingkat pengungkapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Disclosure Index*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Tingginya tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan belum tentu mencerminkan kualitas implementasi tata kelola yang sesungguhnya. Pengungkapan tersebut dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan regulasi tanpa diikuti dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian, hanya rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, tekanan,

peluang, kapabilitas, arogansi, dan tata kelola perusahaan belum mampu menjelaskan variasi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur selama periode penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik financial statement fraud dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi dalam Fraud Pentagon Theory.

REFERENSI

- [1] Widiyantara, I. G. A., Pradnyani, N. L. P. S. P., & Wasita, P. A. A. (2024). *The Effect of Corporate Social Responcibility, and Good Corporate Governance on The Financial Performance of The Health Sector Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2019-2022*. *International Journal of Pertapsi*, 2(1), 29–39. <https://doi.org/10.9744/ijp.2.1.29-39>
- [2] Andriyani, A. D., & Yuniningsih, Y. (2025). The Moderating Role of Earnings Quality in the Nexus Between Financial Risk, Profitability, Investment Opportunity Set, and Foreign Ownership with Financial Reporting Integrity. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(07), 9332–9343.
- [3] Afriani, Y., & Trisnawati, E. (2025). Pengaruh Struktur Modal Dan Investment Opportunity Set Terhadap Kualitas Laba Dengan Tata Kelola Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 5(2), 383–397.
- [4] Basyar, M. A. K., Diana, N., & Afifudin, A. (2024). Fraud Hexagon dan Analisis Tata Kelola Perusahaan Terhadap Potensi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(02), 111–122.
- [5] Sevi, D., Mulyati, S., & Kurniawan, A. (2021). The Effect Of Knowledge Of Ethics, Religiosity, Ethical Sensitivity, Ethical Orientation To Accounting Students Perception Of Creative Accounting Practices. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 63–88. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.685>
- [6] Abbas, D. S., Mulyadi, Basuki, & Fatika, S. (2020). Analisis Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Score Model. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(10), 65–75.
- [7] Nurdiana, I., & Khusnah, H. (2023). Pengaruh Financial Distress, Female CEO, Profitabilitas, Op-poutunity dan Materialitas Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Studi kasus pada perusahaan yang dikeluarkan dari indeks Pefindo25 Bursa Efek Indonesia priode 2015-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 44–54. <https://doi.org/10.32639/jiak.v12i1.300>
- [8] *Occupational Fraud: A Report to the Nations* (p. 108). (2026). [Research Report]. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). <https://www.acfe.com/report-to-the-nations>
- [9] ACFE Indonesia. (2025). *Survei Fraud Indonesia 2025*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2025/>
- [10] Asih, D. K., Supriyatna, D., Fitriannisa, E. A., Meisya, E., & Nofriyanti. (2025). Fraud Analysis in the Corruption Case of PT. Waskita Karya Based on Ethical Principles and GCG Principles. *EAJ (Economic and Accounting Journal)*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.32493/eaj.v8i1.y2025.p1-9>
- [11] Parulian, T., & Mahendra, A. (2022). Analysis of the Influence of Road Infrastructure, Electrical Infrastructure and Health Infrastructure on Economic Growth with Investment as a Moderating Variable in Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 9(1), 489–496. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220155>
- [12] Rahayu, E. T., Putri, A. L. I., & Huda, A. M. (2026). Dampak Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Suatu Tinjauan Pustaka. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 8012–8017. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4811>
- [13] Hardinata, D., & Hardinata, A. P. (2024). Understanding with a Practical Perspective the Corruption Mode of Goods/Services Procurement in Indonesian Public Organizations. *International Review of Management and Marketing*, 14(1), 20–30. <https://doi.org/10.32479/irmm.15436>
- [14] Raihandika, A. B., & Sudrajad, O. Y. S. Y. (2025). Determining the Optimal Capital Structure of PT. Waskita Karya Tbk (Persero). *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1271–1283. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1239>

- [15] Basmar, N. A., & Sulfati, A. (2022). Pendekatan Crowe's Fraud Pentagon Theory Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 398–419. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2391>
- [16] Damarjati, R. G., & Yulianti, R. (2025). Pengaruh Penerapan Heptagon Fraud Theory Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), 55–73. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.156>
- [17] Dewi, C. K., & Yuliaty, A. (2022). Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 115–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262498>
- [18] Wicaksono, B., Rachman, A., & Setyaningsih, P. A. (2023). Pengaruh Fraud Pentagon, Stabilitas Keuangan, dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Monex: Journal of Accounting Research*, 12(2), 297–308. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5472>
- [19] Islamiati, D., & Putra, W. M. (2024). Analisis Fraud Pentagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2020). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1748–1756. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1630>
- [20] Burlacu, G., Robu, I.-B., Anghel, I., Rogoz, M. E., & Munteanu, I. (2025). The Use of the Fraud Pentagon Model in Assessing the Risk of Fraudulent Financial Reporting. *Risks*, 13(6), 102. <https://doi.org/10.3390/risks13060102>
- [21] Isu, E. M. F., & Sofie. (2025). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Ego, Dan Kolusi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 265–274. <https://doi.org/10.25105/v5i1.22267>
- [22] Huang, M., Anggrainy, S., Go, T., Calista, V., Rahmi, N. U., & Yulisfan, Y. (2025). Pengaruh Financial Target, External Pressure, Financial Stability, Auditor Switch Dan Change Of Director Terhadap Tindakan Kecurangan Yang Terjadi Pada Laporan Keuangan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 6(3), 1866–1875. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i3.7574>
- [23] Fernanda, R. E., & Susilo, D. E. (2025). Pengaruh Financial Stability, Financial Target, Dan Capability Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 399–411. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1944>
- [24] Healy, P. M., & Palepu, K. (2000). *Information Asymmetry, Corporate Disclosure and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature* (SSRN Scholarly Paper No. 258514). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.258514>
- [25] Pangestu, N. R. N. (2021). Peran Tata Kelola Perusahaan Untuk Memitigasi Kecurangan Laporan Keuangan Dan Kompensasi Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7680>
- [26] Savitri, S., & Herliansyah, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyalahgunaan Aset Dengan Kualitas Audit Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4219–4231. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1169>
- [27] As'ad, Z. A., & Sulistyowati, E. (2026). The Impact Of Good Corporate Governance On Fraud Prevention. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 7(1), 15–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v7i1.2726>
- [28] Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [29] Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>